

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA SERANG  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN**

**JL. LETNAN JIDUN NO. 4A, TELP/FAX. 204082 KEPANDEAN SERANG  
TAHUN 2022**

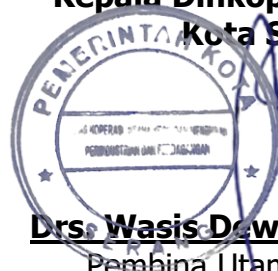
## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2023. Pada dasarnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2023 merupakan pedoman dan acuan penyelenggaraan Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas Kopukmperindag Kota Serang Tahun 2023

Semoga Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam Pencapaian sasaran Program dan Kinerja. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2023.

Serang, Juli 2022

**Kepala Dinkopukmperindag  
Kota Serang**



**Drs. Wasis Dewanto, M.Pd, M.Si**

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 196706221993031005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	11
1.3 Maksud dan Tujuan .....	13
1.4 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA</b> .....	16
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD .....	18
2.2 Analisis Kinerja Dinkopukmperindag Kota Serang .....	30
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	34
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	35
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinkopukmperindag .....	35
3.3 Program dan Kegiatan .....	36
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT</b>	
<b>DAERAH</b> .....	47
4.1 Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah .....	47
4.2 Rencana Program Mendesak dan Unggulan .....	47
4.3 Rencana Program dan Kegiatan Melalui Sumber Dana APBD Provinsi dan APBN .....	48
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	50

## DAFTAR TABEL

1.1 Struktur Organisasi .....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 .....	20
3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 .....	31
4.1 Rumusan rencana pendapatan perangkat daerah tahun 2023.....	39
4.2.1 Rumusan rencana kegiatan pada program mendesak tahun 2023 .	40
4.2.2 Rumusan rencana kegiatan pada program unggulan tahun 2023...	41
4.2.3 Rumusan rencana kegiatan pada program sumber dana DAK/APBN tahun 2023.....	42

# **BAB I P E N D A H U L U A N**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 Tahun.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat Pusat dan Provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi sebagai Program/ Kegiatan baik di Pusat maupun di Daerah dan pada akhirnya berbagai Program Pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada Masyarakat di Kota Serang khususnya.

Selanjutnya untuk setiap Tahunnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan selama Periode 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis lima Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 1 (satu) Tahun.

Sebagai sebuah dokumen resmi Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung Visi dan Misi Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun- Tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun Program dan Kegiatan Prioritas OPD pada Tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, bidang Koperasi, bidang Usah Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Pengelolaan Pasar.

Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, secara hirarki susunan kepegawaian digambarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Koperasi, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perdagangan, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Perindustrian, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya; dan
- j. Jabatan Pelaksana.

**a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan dan urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, sesuai dengan Visi, Misi dan Program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**b. Sekretariat**

- 1. Sekretariat di Pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di Bidang administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian, Program, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Untuk melaksanakan tugas pokok bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
- 3) Menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
- 4) menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
- 5) melaksanakan pelaporan; dan
- 6) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Bidang Koperasi**

1. Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan penilaian kesehatan koperasi, pengembangan/pemberdayaan koperasi, dan pengawasan dan kelembagaan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
  - 1) Mengoordinasikan pelaksanaan koperasi;
  - 2) Pengoordinasian perluasan akses pembiayaan dan permodalan koperasi;
  - 3) Mempromosikan akses pasar produk koperasi; dan
  - 4) pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;



- 5) Pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
  - 6) Pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
  - 7) Pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi; dan
  - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya
3. Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

**d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

1. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pemberdayaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, fasilitasi, penguatan dan perlindungan usaha mikro, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;
  - b. Mengkordinir perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah;
  - c. Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro kecil dan menengah;
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota usaha mikro kecil dan menengah;
  - e. Mengkoordinasikan kemitraan antar usaha mikro kecil dan menengah dan badan usaha lainnya;
  - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah;

- h. Mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
  - i. Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro kecil dan menengah;
  - j. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;
  - k. Mengkoordinasikan pendataan pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
  - l. Mengkoordinasikan pengembangan dengan orientasi peningkatan usaha mikro kecil dan menengah;
  - m. Mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan; dan
  - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**e. Bidang Perindustrian**

1. Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan industri
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang industri;
  - b. Penyiapan Bahan koordinasi pengendalian dan pembinaan bidang industri;
  - c. Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang industri meliputi registrasi dan pengendalian, perencanaan pengembangan dan pembangunan industri.
  - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang industri; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya

3. Bidang Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

**f. Bidang Perdagangan**

1. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan perdagangan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan promosi
2. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan promosi;
  - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan promosi;
  - c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan promosi;
  - d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang pokok dan promosi; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**g. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan**

1. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengelolaan pasar dan pedagang kreatif lapangan
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan pembinaan dan ketertiban;
  - b. Penyelenggaraan sarana dan prasarana pasar;
  - c. Penyelenggaraan pendataan dan retribusi;
  - d. Pelaporan di bidang pembinaan dan ketertiban, sarana dan prasarana pasar, pendataan dan retribusi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

### **Sumber Daya Manusia**

Dalam menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap sektor Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, maka perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai yang diantaranya:

#### **A. Personalia :**

Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Serang No. 126 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, memiliki personalia/ pegawai yang terdiri dari :

- a) 1 Orang Kepala Dinas
- b) 1 Orang Sekretaris
- c) 5 Orang Kepala Bidang
- d) 2 Orang Kepala Sub Bagian
- e) 16 Orang Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Penyetaraan

- f) 2 Orang Kepala UPT
- g) 2 Orang Kepala Sub UPTD
- h) 1 Orang Fungsional
- i) 16 Orang Staf/ Pelaksana
- j) 57 TKS/ Tenaga Salar
- k) 8 Orang Operator

Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Kopukmperindag Kota Serang sebanyak 98 Orang baik yang ASN dan Non ASN di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang dalam Tahun Anggaran 2022

Jumlah PNS Dinas Kopukmperindag Kota Serang

Menurut Tingkat Pendidikan

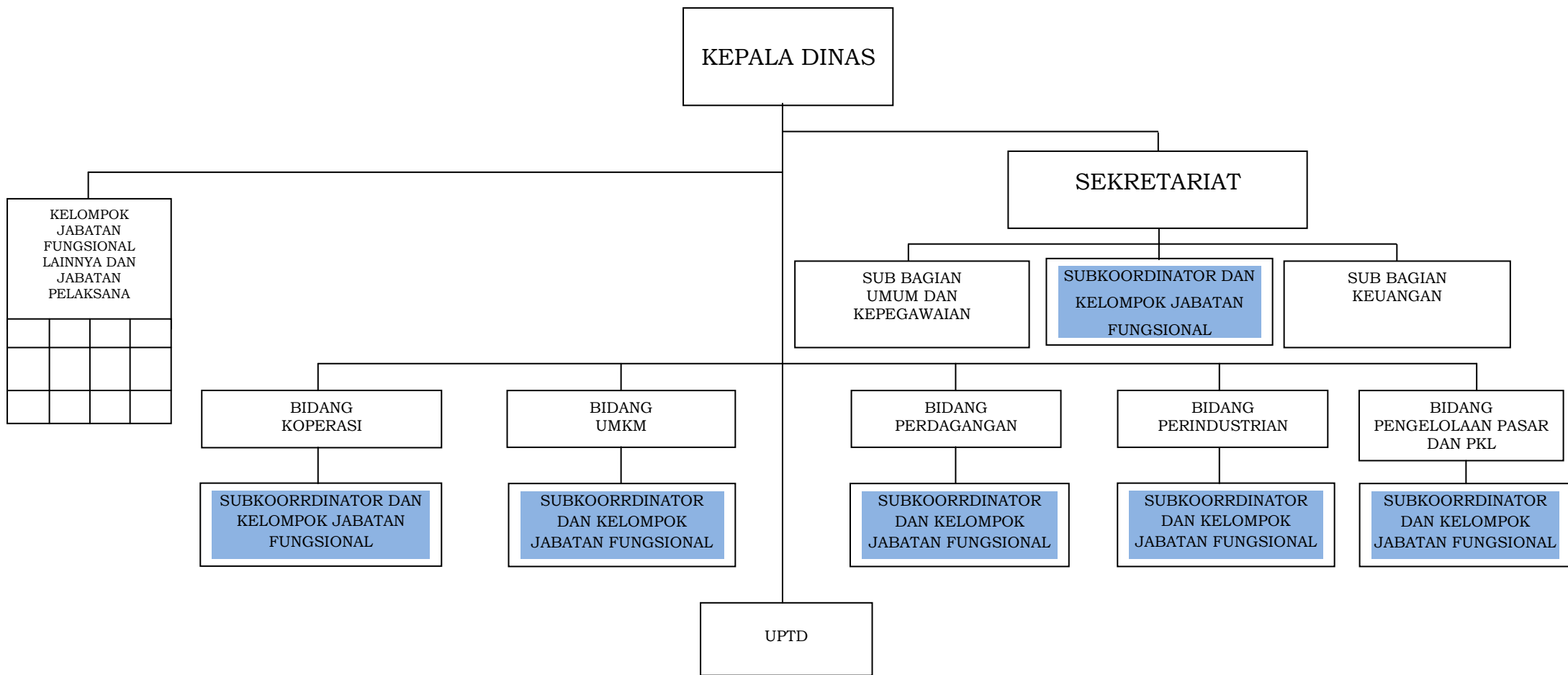
STRATA 2	16 Orang
STRATA 1	26 Orang
D.III	3 Orang
SLTA	1 Orang
<b>J u m l a h</b>	<b>46</b> Orang

Jumlah ASN Dinas kopukmperindag Kota Serang

Menurut Tingkat Pangkat Golongan/Ruang

Pembina Utama Mada	IV.c	1 Orang
Pembina Tk I	IV.b	3 Orang
Pembina	IV.a	8 Orang
Penata TK I	III.d	11 Orang
Penata	III.c	8 Orang
Penata Muda Tk. I	III.b	2 Orang
Penata Muda	III.a	11 Orang
Pengatur	II.c	2 Orang
<b>J u m l a h</b>		<b>46</b> Orang

**TABEL 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SERANG 2022**



## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Rencana Kerja Diskopukmperindag Kota Serang Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan pada Peraturan Perundangan sebagai berikut:

1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Serang Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016);



16. Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organasasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 20212 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2023 dimaksudkan menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang dalam rangka melaksanakan Pembangunan dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terhadap penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.

Oleh karena itu, tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Kota Serang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2023;
2. Menjadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2023;
3. Sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan evaluasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPUKMPERINDAG TAHUN 2022**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Dinas Kopukmperindag Kota Serang
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kopukmperindag Kota Serang
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah
- 4.2 Rencana Program Unggulan dan Mendesak

4.3 Rencana Program dan Kegiatan Melalui Sumber  
Dana APBD Provinsi dan APBN

**BAB V PENUTUP**  
**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2022**

#### **2.1. EVALUASI RENJA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2022 hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan II terhadap 10 (sepuluh) Program adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu 28,08 %.
2. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu 30,99%.
3. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, dan 2 (dua) Sub Kegiatan, dengan penyerapan anggaran yaitu 81,29%
4. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Pengembangan UMKM yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, dengan penyerapan anggaran yaitu 50,79%
5. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan dengan penyerapan anggaran yaitu 55,24%. Pencapaian kinerja pada kegiatan ini antara lain dikarenakan tolok ukur- tolok ukur kegiatannya merupakan kebutuhan pokok bagi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya juga tetap mempertimbangkan azas efisiensi. Hal ini juga menggambarkan ketepatan dalam perencanaan kinerja kegiatan.

6. Tingkat Pencapaian Kinerja (nilai capaian akhir) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan penyerapan anggaran yaitu 19,89%.
7. Tingkat Pencapaian Kinerja (nilai capaian akhir) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan dengan penyerapan anggaran yaitu 8,36%.
8. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Pengembangan Ekspor terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan penyerapan anggaran yaitu 0%, hal ini disebabkan akibat masih adanya pandemi pelaksanaan pameran di tiadakan.
9. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) Program Standarisasi dan Perlindungan Perdagangan terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan penyerapan anggaran yaitu 29,50%
10. Tingkat Pencapaian Kinerja (nilai capaian kinerja) dari Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan penyerapan anggaran yaitu 3,00%

Berikut ini adalah Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 :

**REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KOTA SERANG**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran /Program /Program (Outcome) / Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Renstra OPD pada Tahun 2018-2023		Realisasi Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2020		Target Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 -2023 samapai dengan Tahun Berjalan (2022)			
							Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD				Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra s/d Tahun Berjalan 2022 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4*100)	
	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH																	
	Tujuan : Meningkatkan kelembagaan koperasi yang sehat dan usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro Yang Berdaya	4,7	5.491.244.632	3,7	1.025.213.300	4	1.113.389.994	3,17	1.093.221.250								
	Sasaran : Meningkatnya Pembinaan dan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase koperasi yang sehat	7,91	2.610.943.482	6,15	522.047.000	7	690.454.994	6	681.471.250			7,35					
		Persentase pertumbuhan Usaha Mikro	5,71	1.262.514.650	5,38	260.047.300	5	158.685.000	5,20	154.050.000			5,59					
		Realisasi usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	0,34	1.617.786.500	0,07	243.119.000	0	264.250.000	0,04	257.700.000			0,08					
2	17	4																
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	Capaian koperasi yang aktif	37,87	375.598.000	35,42	110.798.000	36,24	80.000.000	34,89	77.431.000	96,2748344	96,79	37,06	61.940.000	34,89	250.169.000	92,13	66,61
2	17	4	2.01															
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Koperasi Yang di Nilai	81,48	375.598.000	76,92	110.798.000	76,92	80.000.000	76,92	77.431.000	96,79	96,79	79,25	61.940.000	76,92	250.169.000	94,40	66,61
2	17	4	2.01	01														
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Di Nilai	44		40		40		40	100	96,79	40		40,00			90,91	
			11	375.598.000	8	110.798.000	9	80.000.000	9	77.431.000	100		10	61.940.000	9,00	250.169.000	81,82	66,61

2	17	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang dibina	62,67	1.888.975.482	56,00	338.129.000	57	610.454.994	57,22	604.040.250	100	99	59,95	598.371.735	57,22	1.540.540.985	91,30	82,43	
2	17	5	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Mendapatkan Pelatihan	32,70	1.888.975.482	40	338.129.000	27	610.454.994	27,25	604.040.250	100	99	29,97	598.371.735	32,70	1.540.540.985	100,00	82,43	
2	17	5	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperas	Dokumen Data Koperasi Pelaksanaan Hari Koperasi (Gemaskop dan Jalan Sehat) Jumlah Koperasi di Didik dan Dilatih	5 15 120	1.868.975.482	2 3 50	338.129.000	1 - 100	610.454.994	1 0 100	604.040.250	100	99	1 3 110	598.371.735	3 5 100	1.540.540.985	60,00 33,33 83,33	82,43
2	17	6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang Berdaya	60	346.370.000	20	73.120.000	-	-	0	-	-	-	42,00	71.145.000	20	144.265.000	33,33	41,65	
2	17	6	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Yang Berdaya	23	346.370.000	10	73.120.000	-	-	0	-	-	-	8	71.145.000	10	144.265.000	43,48	41,65	
2	17	6	2.01	01	Pemberdayaan Peningkata Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan RestrukturisUsaha Koperasi Kewenangann Kab/Kota	Jumlah Koperasi	150	346.370.000	50	73.120.000	-	-	0	-	-	50	71.145.000	100	144.265.000	66,67	41,65	
2	17	7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang terakses dukungan pengembangan usaha	2,75	1.262.514.650	1,85	260.047.300	2	158.685.000	2,19	154.050.000	100,00	97	2,49	352.920.000	2,19	426.097.300	79,64	33,75	

2	17	7	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan Pelaku Usaha Mikro Yang di Fasilitas	1,91	1.262.514.650	1,72	260.047.300	2	158.685.000	1,88	154.050.000	100,00	97	1,90	352.920.000	2	426.097.300	98,43	33,75	
2	17	7	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Data Pelaku Usaha Yang Berlegalitas	4	585.947.050	1	72.192.000	1	56.355.000	1	52.920.000	100	94	1	288.600.000	3	137.112.000	75,00	23,40
2	17	7	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro	250	676.567.600	40	187.855.300	50	102.330.000	50	101.130.000	100	99	50	64.320.000	200	288.985.300	80,00	42,71
2	17	8			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase Usaha mikro yang dibina</b>	<b>7,64</b>	<b>1.617.786.500</b>	<b>7,54</b>	<b>243.119.000</b>	<b>7,59</b>	<b>264.250.000</b>	<b>7,59</b>	<b>257.700.000</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>7,60</b>	<b>221.415.000</b>	<b>7,57</b>	<b>722.234.000</b>	<b>99,02</b>	<b>44,64</b>
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro Yang di Bina	900	1.617.786.500	270	243.119.000	150	264.250.000	150	257.700.000	100	98	180	221.415.000	420	722.234.000	46,67	44,64
2	17	8	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Bimtek Pengembangan Usaha Mikro Makanan	300	1.617.786.500	90	243.119.000	50	264.250.000	50	257.700.000	100	98	60	221.415.000	140	722.234.000	46,67	44,64
					Bimtek Pengembangan Usaha Mikro Kerajinan	300	90		50		50		100		60	140	46,67					
					Bimtek Pengembangan Usaha Mikro Konveksi	300	90		50		50		100		60	140	46,67					
<b>PERDAGANGAN</b>																						
2. Sasaran : Meningkatnya Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah						Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Skala 0 - 100)	80	41.374.523.714	67,3	15.340.506.535	70	7.845.444.284		7.634.128.141			75	7.818.699.490				
3. Sasaran : Terkendalinya Stabilitas Harga dan Pasokan Terhadap Nilai Inflasi Daerah						NILAI STABILITAS HARGA DAN PASOKAN	24,66	4.359.377.304	20,55	1.967.265.960	72,73	842.907.920	66,66	685.672.950			23,29					



3	30	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Indeks Keuasan Pelayanan Keseekretariatan	100,00	41.381.036.465	100	15.340.506.535	100	7.845.444.284	100	7.634.128.141	100	97	100	7.818.699.490	100,00	30.705.362.572	100,00	74,20	
3	30	1	2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	39	1.248.441.633	2	497.185.000	13	172.071.750	13	161.082.750	100	93,61	12	181.722.170	28,00	839.989.920	71,79	67,28	
3	30	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra OPD	3		2	0		1		100	86,62	0		3		100		
					Jumlah Dokumen Renja Murni	5	429.595.075	2	133.341.800	1	65.718.500	1	56.928.000	100		1	70.342.750	4	260.612.550	80	60,66	
					Jumlah Dokumen Renja Perubahan	5		2		1		1		100		1		4		80		
					TAPKIN, IKU	12		2		2		2		100		1		10		83		
3	30	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	5	43.204.368	2	13.036.200	1	9.114.250	1	9.050.250	100	99,30	1	8.385.500	3	30.471.950	60	70,53
3	30	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	5	38.076.350	2	13.036.200	1	7.565.000	1	7.501.000	100	99,15	1	6.931.500	3	27.468.700	60	72,14
3	30	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA	5	41.276.620	2	12.870.200	1	8.582.000	1	8.582.000	100	100,00	1	5.870.000	3	27.322.200	60	66,19
3	30	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	5	33.928.920	2	13.036.200	1	6.312.000	1	6.312.000	100	100,00	1	4.703.000	2	24.051.200	40	70,89
3	30	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP	5		2		1		1		100		1		4		80	
					Jumlah Dokumen LPPD	5	662.360.300	2	311.864.400	1	74.780.000	1	72.709.500	100	97,23	1	85.489.420	4	470.063.320	80	70,97	
					Jumlah Laporan Evaluasi Bulanan	5		2		1		1		100		1		3		60		
					Jumlah Laporan Evaluasi Triwulanan	5		2		1		1		100		1		3		60		
3	30	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan</b>	<b>15</b>	<b>29.334.814.900</b>	<b>6</b>	<b>10.365.975.071</b>	<b>3</b>	<b>5.619.610.659</b>	<b>3</b>	<b>5.558.431.043</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>3</b>	<b>6.102.043.980</b>	<b>12</b>	<b>22.012.336.996</b>	<b>80,00</b>	<b>75,04</b>
3	30	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	60	29.098.604.349	24	10.291.521.471	12	5.540.185.659	12	5.482.288.543	100	99	12	6.065.962.479	48	21.839.772.493	80,00	75,05
3	30	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	118.105.275	2	49.249.000	1	20.802.500	1	18.992.500	100	91	1	18.040.750	4	86.282.250	80,00	73,06

4	31	2	2.03	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	6	118.105.276	3	49.249.001	2	20.802.501	2	18.992.501	101	92	2	18.040.751	5	86.282.253	83,33	73,06
5	32	3	2.04	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	7	118.105.277	4	49.249.002	3	20.802.502	3	18.992.502	102	93	3	18.040.752	6	86.282.256	85,71	73,06
3	30	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Aset	30	353.996.400	6	93.660.000	6	48.440.000	6	48.440.000	100	100	6	34.610.000	24,00	176.710.000	80,00	49,92
3	30	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai</b>	<b>100</b>	<b>240.201.400</b>	<b>100</b>	<b>102.207.500</b>	<b>100</b>	<b>41.690.000</b>	<b>100</b>	<b>39.317.500</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>16.010.000</b>	<b>100,00</b>	<b>157.535.000</b>	<b>100,00</b>	<b>65,58</b>
3	30	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas	74	240.201.400	34	102.207.500	40	41.690.000	40	39.317.500	100	94	0	16.010.000	74,00	157.535.000	100	65,58
					Jumlah Stel Pakaian Lapangan	57	57		0		0		5		57,00							
					Jumlah Stel Pakaian Batik	40	-		-		-		0		40,00							
					Jumlah Stel Pakaian Olahraga	40	-		-		-		0		40,00							
3	30	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>100</b>	<b>3.429.274.805</b>	<b>100</b>	<b>1.413.307.966</b>	<b>100</b>	<b>634.573.812</b>	<b>100</b>	<b>598.031.030</b>	<b>100</b>	<b>94,24</b>	<b>100</b>	<b>494.190.752</b>	<b>100,00</b>	<b>2.505.529.748</b>	<b>100,00</b>	<b>73,06</b>
3	30	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	67.903.822	2	28.100.000	1	12.025.324	1	10.980.000	100	91,31	1	11.325.226	4,00	50.405.226	80,00	74,23
3	30	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	60	466.593.946	24	120.408.000	12	103.746.699	12	94.858.250	100	91,43	12	54.412.956	48,00	269.679.206	80,00	57,80
					Peralatan dan Perlengkapan kantor	5	2		1		1		1		4,00	80,00						
3	30	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	5,00	40.115.462	2	18.170.000	1	6.630.049	1	6.620.400	100	99,85	1	21.327.460	4,00	46.117.860	80,00	114,96
3	30	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai	60	162.600.000	24	63.300.000	12	30.000.000	12	29.927.000	100	99,76	12	30.000.000	48,00	123.227.000	80,00	75,79

3	30	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	459.471.813	24	216.131.000	12	73.516.862	12	72.836.000	100	99,07	12	82.340.318	48,00	371.307.318	80,00	80,81
3	30	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	132.533.886	24	49.920.000	12	24.958.878	12	24.740.000	100	99,12	12	24.921.792	48,00	99.581.792	80,00	75,14
3	30	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	60	218.496.960	24	45.000.000	12	52.416.000	12	52.412.000	100	99,99	12	30.000.000	48,00	127.412.000	80,00	58,31
3	30	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	60	1.881.558.916	24	872.278.966	12	331.280.000	12	305.657.380	100	92,27	12	239.863.000	48,00	1.417.799.346	80,00	75,35
3	30	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>740.623.400</b>	<b>100</b>	<b>461.323.400</b>	<b>100</b>	<b>210.000.000</b>	<b>100</b>	<b>184.125.000</b>	<b>100</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>645.448.400</b>	<b>100,00</b>	<b>87,15</b>
3	30	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan	3	99.300.000			1	30.000.000	1	24.125.000	100	80,42	0	-	1,00	24.125.000	33,33	24,30
3	30	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebelair	3	56.433.396	3	56.433.396	0	-	0	-		0	-	2,00	56.433.396	66,67	100,00	
3	30	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sewa Gedung Kantor	1	180.000.000			1	180.000.000	1	160.000.000	100	88,89	0	-	0,00	160.000.000	0,00	88,89
3	30	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan gedung kantor	3	404.890.004	2	404.890.004		0	-			0	-	2,00	404.890.004	66,67	100,00	
3	30	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>2.640.079.888</b>	<b>100</b>	<b>1.036.268.948</b>	<b>100</b>	<b>484.535.027</b>	<b>100</b>	<b>425.706.808</b>	<b>100</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>507.870.800</b>	<b>100</b>	<b>1.969.846.556</b>	<b>100,00</b>	<b>74,61</b>
3	30	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat menyurat	60	34.995.000	24	20.100.000	12	4.500.000	12	4.500.000	100	100	12	4.950.000	48,00	29.550.000	80,00	84,44
3	30	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	713.442.872	24	237.994.472	12	143.640.000	12	97.766.308	100	68	12	162.840.000	48,00	498.600.780	80,00	69,89

3	30	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	60		24	12	12	100	96	12	48,00	80,00						
						Jumlah jasa pengamanan kantor	60	1.891.642.016	24	778.174.476	12	336.395.027	12	323.440.500	100	48,00	80,00	76,21				
						Jumlah kegiatan hari hari besar keagamaan dan HUT Kota Serang	12		3	-	0			2	5,00	41,67						
3	30	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>100</b>	<b>3.629.495.162</b>	<b>100</b>	<b>1.370.578.650</b>	<b>100</b>	<b>634.523.036</b>	<b>100</b>	<b>618.994.010</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>498.821.036</b>	<b>100,00</b>	<b>2.488.393.696</b>	<b>100,00</b>	<b>68,56</b>
3	30	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua	15	2.730.139.662	15	1.144.158.650	14	478.573.036	14	464.697.010	100	97	15	413.533.036	15,00	2.022.388.696	100,00	74,08
						Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat	9		8		9		9	100		9	9,00	100,00				
3	30	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Mebelair yang dipelihara	35	166.009.000	70	-	35	2.800.000	35	2.145.000	100	77	35	3.000.000	35,00	5.145.000	100,00	3,10
3	30	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan yang dipelihara	83	166.009.000	83	93.520.000	83	21.900.000	83	21.170.000	100	97	83	23.670.000	83,00	138.360.000	100,00	83,34
3	30	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung yang dipelihara dan di rehab	3	567.337.500	3	132.900.000	3	131.250.000	3	130.982.000	100	100	1	58.618.000	3,00	322.500.000	100,00	56,84
<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Peredaran Barang</b>						<b>Realisasi stabilitas harga kebutuhan bahan pokok</b>	<b>77,27</b>	<b>4.359.377.304</b>	<b>68,18</b>	<b>1.887.735.960</b>	<b>73</b>	<b>842.907.920</b>	<b>72,73</b>	<b>685.672.950</b>		<b>72,73</b>						
						<b>Persentase Pasar kategori Baik</b>	<b>100,00</b>	<b>22.532.608.868</b>	<b>33,33</b>	<b>7.847.321.940</b>	<b>56</b>	<b>2.178.992.245</b>	<b>55,56</b>	<b>1.876.793.000</b>		<b>77,78</b>						
						<b>Capaian Kontribusi PDRB Perdagangan</b>	<b>28,50</b>	<b>26.891.986.172</b>	<b>27,75</b>	<b>9.735.057.900</b>	<b>28</b>	<b>3.021.900.165</b>		<b>3.040.274.486</b>		<b>28,35</b>						
3	30	2			<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Persentase Distributor Bahan Berbahaya Terdaftar</b>	<b>100</b>	<b>127.674.300</b>	<b>40</b>	<b>52.530.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>19.083.000</b>	<b>100,00</b>	<b>71.613.000</b>	<b>100,00</b>	<b>56,09</b>		

3	30	2	2.06	Pengendalian Fasilitas Harga Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan, Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terdaftar Jenis Bahan Berbahaya yang Perdagangkan	5	127.674.300	2	52.530.000	-	1	-	1	19.083.000	4,00	71.613.000	80,00	56				
3	30	2	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Pengawasan Distribusi Penggunaan Bahan Berbahaya terhadap pengguna akhir maupun produsen	8	127.674.300	4	52.530.000	-	0	-	2	19.083.000	6,00	71.613.000	75,00	56,09			
3	30	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Capaian Pemenuhan Sarana Prasarana Pasar Tradisional</b>	<b>80</b>	<b>22.532.608.868</b>	<b>50,0</b>	<b>7.847.321.940</b>	<b>60</b>	<b>2.178.992.245</b>	<b>60,0</b>	<b>1.876.793.000</b>	<b>100,0</b>	<b>86</b>	<b>70,00</b>	<b>1.639.275.823</b>	<b>70,00</b>	<b>11.363.390.763</b>	<b>87,50</b>	<b>50,43</b>
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Kategori Baik	8	16.740.920.310	7	5.670.621.900	6	1.190.892.995	8	944.962.000	100	79	1	684.733.323	6,00	7.300.317.223	75,00	43,61
3	30	3	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Direvitalisasi / dibangun dan di tata	1		-		-		-	79	1		1,00			100,00		
						Jumlah Kios yang dibangun	500	16.740.920.310	-	5.670.621.900	-	1.190.892.995	-		0		0,00			0,00		
						Jumlah Pasar yang dipelihara / direhab	6		4		2	2	100		0		6,00			100,00		
						Pembangunan wisata kuliner tematik kota Serang	1		-		-				0		0,00			0,00		
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase PKL tertata	91	5.791.688.558	19,32	2.176.700.040	20	988.099.250	18,76	931.831.000	92,59	94	43,71	954.542.500		4.063.073.540		70,15

3	30	3	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina	450		50		150		150		100	82	150		300,00		66,67	
						Jumlah Peraturan / Sosialisasi	3	1.846.700.558		631.462.040	1	263.099.250	1	214.541.000	100		0	214.152.500		1.060.155.540	0,00	57,41
						Audit Laporan Keuangan Kerjasama Pengelolaan Pasar	5		2		1	1		100		1		4,00		80,00		
3	30	3	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Petugas Retribusi Salar Pasar	57	3.944.988.000	57	1.545.238.000	57	725.000.000	57	717.290.000	100	99	57	740.390.000	57,00	3.002.918.000	100,00	76,12
3	30	4			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	30	4.359.377.304	25	1.914.735.960	25	842.907.920	25	685.672.950	25	81	30,00	284.579.280	30,00	2.884.988.190		
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan Bahan Pokok di Tingkat Agen	100	368.018.877	70	102.525.000	78	49.998.150	78,431	45.921.800	100	92	98,04	26.769.500	98,04	175.216.300	98,04	47,61
3	30	4	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dokumen data distributor dan toko	5	368.018.877	2	102.525.000	1	49.998.150	1	45.921.800	100	92	1	26.769.500	4,00	175.216.300	80,00	47,61
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas barang pokok yang dipantau	26		26		26	690.229.770	26		26		26		26,00		100,00	
						Jumlah komoditas barang penting yang dipantau	9	3.663.134.439	9	1.757.663.600	9		9	547.705.150	9	79,35	9	209.316.280	9,00	2.514.685.030	100,00	68,65

3	30	4	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan Hasil Pemantauan Harga Sembako dan Barang Strategis	5	372.355.238	2	94.807.600	1	83.851.250	1	73.231.250	100	87	1	128.990.000	4,00	297.028.850	80,00	79,77
3	30	4	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Sembako yang diserahkan kepada masyarakat	19000	3.290.779.201	7000	1.662.856.000	4.000	606.378.520	4000	474.473.900	100	78		80.326.280	11000	2.217.656.180	57,89	67,39
3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Distributor Pupuk Yang di Awasi	100	427.104.410	100	54.547.360	100	102.680.000	100	92.046.000	100	90	100	48.493.500	100	195.086.860	100,00	45,68
3	30	4	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk di Agen dan Peredaran Barang Berbahaya	5	427.104.410	2	54.547.360	1	102.680.000	1	92.046.000	100	90	1	48.493.500	4,00	195.086.860	80,00	45,68
3	30	5			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Capaian Pembinaan Potensi Ekspor	5	3.771.209.818	1	420.288.500	1	252.492.200	1	244.821.536	100	97	1	1.158.176.650	3,00	1.578.465.150	60,00	41,86
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama / MOU / Kontak Bisnis	4	3.771.209.818	1	420.288.500	1	252.492.200	1	244.821.536	100	97	1	1.158.176.650	3,00	1.578.465.150	75,00	41,86
3	30	5	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha	30	105.970.000	30	105.970.000	-	0	-	-	-	-	0	30,00	105.970.000	100,00	100,00	
3	30	5	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Event Pameran	4	1.293.978.342	1	114.318.500	-	0	-	0	-	-	1	339.359.200	1,00	453.677.700	25,00	35,06
3	30	5	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Event Pameran	10	2.371.261.476	1	200.000.000	1	252.492.200	1	244.821.536	100	97	3	818.817.450	1,00	1.018.817.450	10,00	42,97
3	30	6			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Capaian Penyelesaian Sengketa Konsumen	100	1.326.535.389	100	423.857.974	100	246.120.000	100	232.987.000	100	95	100	224.013.000	100,00	880.857.974	100,00	66,40

3	30	6	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang bertanda tera syah	2500	1.326.535.389	1000	423.857.974	500	246.120.000	500	232.987.000	100	95	500	224.013.000	2000	880.857.974	80,00	66,40	
					Kesadaran Wajib tera (Pemilik UTTP)	2500		1000		500		500		100		500		20000		800,00		
3	30	6	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelayanan tera SPBU	17			17				100	94	17		17		100,00		
					Jumlah pelayanan tera pasar tradisional	7	1.132.055.544	7	423.857.974	7	209.547.000	7	196.550.000	100	#DIV/0!	7		212.856.700	7	833.264.674	100,00	73,61
					Jumlah pelayanan tera pasar modern	4		4		4		4		100	#DIV/0!	4		4		100,00		
3	30	6	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha	90	113.730.330	-	30	36.573.000	30	36.437.000	100	100	30		11.156.300	30	47.593.300	33,33	41,85
3	30	6	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Dokumen Hasil Penyidikan	3	80.749.515	-	1	-	1	-	100	-	-		-	-	-	0,00	0,00
					<b>PERINDUSTRIAN</b>																	
					Tujuan : Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap Perekonomian Daerah	NILAI KONTRIBUSI PDRB INDUSTRI	4,90	9.097.897.540	4,48	6.557.285.480,00	4,87	288.162.208,00		282.371.468,00								
					Sasaran : Meningkatkan Pertumbuhan dan Kualitas Produk IKM	Capaian Pengembangan Produk Unggulan Daerah	100,00	8.670.290.577	16,67	6.345.953.080,00	20,83	195.381.208,00	20,83	192.462.468,00								
						Realisasi Industri Rumah Tangga Yang Berdaya	81,52	217.380.563	13,33	6.809.576.080,00	15,00	75.701.000,00	15,00	75.701.000,00								
						Persentase Pertumbuhan Industri	3,50	210.226.400	-0,08	6.557.285.480,00	2,50	17.080.000,00	2,23	14.208.000,00								
3	31	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Capaian kualitas dan kuantitas produk IKM	6,44	9.097.897.540	3,47	6.557.283.480	4	288.162.208	4,46	282.371.468	100,00	97,99	5,45	255.465.000	5,45	7.095.119.948	84,56	77,99
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Capaian kualitas dan kuantitas produk IKM	4	9.097.897.540	0	6.557.283.480	1	288.162.208	1	282.371.468	100	97,99	1	255.465.000	3,00	7.095.119.948	75,00	77,99
3	31	2	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen RPIK	2	210.226.400	1	134.525.400	1	75.701.000	1	75.701.000	100	100,00	0	-	2	210.226.400		100
3	31	2	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan IKM	650		150		80		80		100	99	70		230		35,38	
					Bimtek dan Fasilitas Sertifikasi Halal/Uji Masa Simpan/Pendaftaran Hak Merk	170	8.670.290.577	30	6.355.953.080		195.381.208		192.462.468		100		15		62		36,47	
					Dokumen Data IKM Kota Serang	4				0		0				1		0		0,00		
					Gedung Sentra IKM (DAK)	1		1				0				0		1		100,00		
					Pembinaan Pengurus Dekranasda	45		0		0		0		0		45		0		0,00		
3	31	2	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Monitoring dan Evaluasi	3	217.380.563	1	66.805.000	1	17.080.000	1	14.208.000	100	83	1	29.040.000	2	110.053.000	66,67	50,63



## **2.2. ANALISIS KINERJA DINAS DISKOPUKMPERINDAG KOTA SERANG**

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang merupakan kinerja pelayanan yang ditetapkan berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.3. ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

Berdasarkan kondisi saat ini maka permasalahan yang dihadapi dalam Bidang, Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan, adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya pengelolaan kawasan perdagangan / Pasar
2. Rendahnya kualitas dan pelayanan infrastruktur Pasar tradisional
3. Kurangnya Penataan dan Fasilitasi Pedagang PKL dan Pasar Tradisional Kota Serang;
4. Kurangnya kreatifitas Masyarakat dalam menciptakan produk-produk industri potensial yang berasal dari sumberdaya lokal dan perluasan lapangan kerja lokal;
5. Kurangnya promosi usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha;
6. Kurangnya akses permodalan bagi industri kecil dalam peningkatan pendapatan;
7. Belum terciptanya Kawasan industri bagi produk- produk unggulan daerah;
8. Rendahnya peran Koperasi dalam peningkatan ekonomi Masyarakat
9. Rendahnya SDM pengelola Koperasi dan UKM.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kopukmperindag Kota Serang Tahun 2023 telah mengacu pada dokumen Perwal Nomor Tahun 2022 Tentang RKPD Kota Serang Tahun 2023.

#### **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan harus senantiasa mengkaji usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan

Pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Untuk perencanaan di Tahun 2023, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang mendapat usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat melalui reses Dewan dan forum OPD sebagai berikut :

1. Usulan DPD APKLI Kota Serang, Permohonan Dana Hibah uang pembuatan gerobag
2. BKM Cipare Jaya, pengadaan ALAT pendukung mebeler gerai UMKM (PPMK )
3. BKM Karomah Kelurahan Banten, pengadaan ALAT pendukung mebeler gerai UMKM (PPMK)

Usulan masyarakat tersebut kami akomodir pada Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Tabel 2.5)

Tabel 2.5					
Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kota Serang					
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengembangan UMKM	Kota Serang	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pemasaran	300.000.000	Masing masing BKM Rp. 150.000.000,- (BKM Cipare Jaya dan BKM Karomah)
	Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil				
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan Pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi				
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Serang	Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	DPD APKLI KOTA SERANG (Pembuatan Gerobag untuk 20 Pedagang)
	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya				
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan Pembangunan yang dihadapi dan capaian Pembangunan selama ini, maka Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah :

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI  
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Atas dasar kebijakan nasional tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai OPD lingkup Pemerintah Kota Serang harus mensinergikan antara prioritas Pembangunan Nasional, prioritas Pembangunan Provinsi Banten dan

Prioritas Pembangunan Kota Serang yang nantinya tertuang dalam dokumen RKPD.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPUKMPERINDAG KOTA SERANG**

#### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan merupakan target- target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target- target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Berdasarkan hal yang berpangkal Kepada Visi, Misi dan ukuran keberhasilan kinerja yang telah ditargetkan maka Diskopukmperindag Kota Serang menetapkan Tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelembagaan koperasi yang sehat dan usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil
2. Terkendalinya stabilitas harga dan pasokan terhadap nilai inflasi daerah
3. Meningkatnya kontribusi sektor Industri terhadap perekonomian daerah

#### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari Tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sasaran yang berorientasi pada outcome itu bersifat (objective) harus berorientasi perbaikan kondisi keadaan dalam bentuk (kuantitas, kualitas, efesiensi, efektivitas, proses, perilaku) bukan berorientasi pada proses/ kegiatan. Sasaran Diskopukmperindag Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pembinaan dan pertumbuha koperasi dan usaha mikro
2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan peredaran barang
3. Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas produk IKM
4. Meningkatnya nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Tujuan dan sasaran tersebut di atas dijabarkan dalam Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, dimana Pada Tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang akan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang telah di rancang melalui Renja 2023 ini. Program, Kegiatan dan Kegiatan tersebut tercantum pada usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas Tahun 2023 Tabel 3.3 berikut ini :

**Tabel 3,3**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SERANG**

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN / PROGRAM/KEGIATAN	KODE REK	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
					KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SUB KEGIATAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR															
	Meningkatnya kelembagaan koperasi yang sehat dan usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil		<b>PERSENTASE KOPERASI DAN USAHA MIKRO YANG BERDAYA</b>				%		4,7				4,7		DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Meningkatnya pembinaan dan pertumbuhan koperasi dan usaha mikro	Persentase koperasi yang sehat				%		7,91				7,91		KADIS
			Persentase pertumbuhan Usaha Mikro				%		5,71				5,71		
			Realisasi usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil				%		0,09				0,09		
				2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Capaian koperasi yang aktif	%		37,87	95.510.000			37,87	96.800.000	Kadis
				2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Capaian Koperasi Yang di Nilai	%		68,97	95.510.000			68,97	96.800.000	Kepala Bidang Koperasi

				2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Kota Serang	44	95.510.000	APBD Kota		45	100.000.000	Kepala Seksi Fasilitas dan Kemitraan
				<b>2.17.05</b>	<b>Program dan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>Persentase koperasi yang dibina</b>	<b>%</b>		<b>62,6703</b>	<b>602.227.912</b>			<b>62,6703</b>	<b>650.000.000</b>	<b>Kadis</b>
				2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah keanggotaan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Pemahaman tentang perkoperasian	%		32,70	602.227.912			32,70	650.000.000	Kepala Bidang Koperasi
				2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	Kota Serang	120	602.227.912	APBD Kota		120	650.000.000	Kepala Seksi Pendaftaran dan Bina Kelembagaan
				<b>2.17.06</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi Yang Berdaya</b>	<b>%</b>		<b>60,00</b>	<b>74.358.000</b>			<b>60,00</b>	<b>80.000.000</b>	<b>Kadis</b>
				2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi Yang Berdaya	Koperasi		9	74.358.000			9	80.000.000	Kepala Koperasi
				2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kota Serang	50	74.358.000	APBD Kota		50	80.000.000	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam



				<b>2.17.07</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Persentase Usaha mikro yang terakses dukungan pengembangan usaha</b>	<b>%</b>		<b>2,75</b>	<b>191.788.750</b>			<b>1,18</b>	<b>220.000.000</b>	<b>Kadis</b>
				2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan, Perjinan, Kegiatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	Cakupan Pelaku Usaha Mikro Yang di Fasilitasi	%		1,91	191.788.750			0,80	220.000.000	Kepala Bidang UMKM
				2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			Kota Serang	1,00	67.969.500	APBD Kota		1,00	70.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan
				2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perjinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan perizinan	Orang	Kota Serang	70	123.819.250	APBD Kota		70	150.000.000	Kepala Seksi Pemberdayaan
				<b>2.17.08</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Persentase Usaha mikro yang dibina</b>	<b>%</b>		<b>7,64</b>	<b>504.717.500</b>			<b>7,64</b>	<b>350.000.000</b>	
				2.17.08.2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro Yang di Bina	Orang		240	504.717.500			240	350.000.000	
				2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan Pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	Kota Serang	200	504.717.500	APBD Kota		200	350.000.000	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas

				3.30.03.2.01	Pembangunan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Kategori Baik	Pasar		2	467.745.000			2	467.745.000	
				3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		1	467.745.000	APBD Kota		1	467.745.000	
				3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Persentase PKL tertata	%		77,80	1.054.530.000			77,80	1.054.530.000	
				3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Kota Serang	1	327.440.000	APBD Kota		1	327.440.000	
				3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Kota Serang	1	727.090.000	APBD Kota		1	727.090.000	
				<b>3.30.04</b>	<b>Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting</b>	<b>%</b>		<b>30,00</b>	<b>336.900.260</b>			<b>30,00</b>	<b>988.804.212</b>	
				3.30.04.2.01	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Bahan Pokok di Tingkat Agen	%		80	59.987.750			80	65.000.000	
				3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	Kota Serang	1	59.987.750	APBD Kota		1	65.000.000	

				3.30.03.2.01	Pembangunan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Kategori Baik	Pasar		2	467.745.000			2	467.745.000	
				3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		1	467.745.000	APBD Kota		1	467.745.000	
				3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Persentase PKL tertata	%		77,80	1.054.530.000			77,80	1.054.530.000	
				3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Kota Serang	1	327.440.000	APBD Kota		1	327.440.000	
				3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Kota Serang	1	727.090.000	APBD Kota		1	727.090.000	
				<b>3.30.04</b>	<b>Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting</b>	<b>%</b>		<b>30,00</b>	<b>336.900.260</b>			<b>30,00</b>	<b>988.804.212</b>	
				3.30.04.2.01	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Bahan Pokok di Tingkat Agen	%		80	59.987.750			80	65.000.000	
				3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	Kota Serang	1	59.987.750	APBD Kota		1	65.000.000	

				3.30.04.2.02	Pengendalian harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kab/Kota	Persentase Stabilisasi Harga Barang Pokok	%		85	226.708.510				260.000.000	
				3.30.04.2.02.02	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Inforasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	Kota Serang	1	85.295.000	APBD Kota		1	110.000.000	
				3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam Satu Kab/ Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)	Laporan	Kota Serang	1	141.413.510	APBD Kota		1	150.000.000	
				3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Distributor Pupuk Yang di Awasi	%		100	50.204.000			100	80.000.000	
				3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	Kota Serang	1	50.204.000	APBD Kota		1	80.000.000	
				<b>3.30.05</b>	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>Capaian Pembinaan Potensi Ekspor</b>	<b>Perusahaan</b>		<b>1</b>	<b>1.201.798.650</b>			<b>1</b>	<b>1.435.000.000</b>	
				3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Satu Daerah Kab/ Kota	Kerjasama / MOU / Kontak Bisnis	Dokumen		1	1.201.798.650			1	1.435.000.000	

				<b>3.31.02</b>	<b>Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>Capaian kualitas dan kuantitas produk IKM</b>			<b>6,44</b>	<b>321.740.000</b>			<b>6,44</b>	<b>321.740.000</b>	
				3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Dokumen		2	321.740.000			2	321.740.000	
				3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Kota Serang	1	252.950.000	APBD Kota		1	252.950.000	
				3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	Kota Serang	1	68.790.000	APBD Kota		1	68.790.000	
<b>NON URUSAN</b>		Meningkatnya nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah			Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Skala 0 - 100)	Skor			75,00						
				<b>3.30.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>8.542.628.273</b>			<b>100</b>	<b>9.695.976.488</b>	
				3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen		15	298.393.500			15	274.628.558	
				3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kota Serang	5	113.342.500	APBD Kota		5	108.298.025	
				3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Kota Serang	1	9.974.250	APBD Kota		1	11.028.243	

				<b>3.31.02</b>	<b>Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>Capaian kualitas dan kuantitas produk IKM</b>			<b>6,44</b>	<b>321.740.000</b>			<b>6,44</b>	<b>321.740.000</b>	
				3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Dokumen		2	321.740.000			2	321.740.000	
				3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Kota Serang	1	252.950.000	APBD Kota		1	252.950.000	
				3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	Kota Serang	1	68.790.000	APBD Kota		1	68.790.000	
<b>NON URUSAN</b>		Meningkatnya nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah			Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Skala 0 - 100)	Skor			75,00						
				<b>3.30.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>8.542.628.273</b>			<b>100</b>	<b>9.695.976.488</b>	
				3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen		15	298.393.500			15	274.628.558	
				3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kota Serang	5	113.342.500	APBD Kota		5	108.298.025	
				3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Kota Serang	1	9.974.250	APBD Kota		1	11.028.243	

				3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Kota Serang	1	8.645.000	APBD Kota		1	9.153.650	
				3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Kota Serang	1	7.922.000	APBD Kota		1	10.384.220	
				3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Kota Serang	1	7.457.000	APBD Kota		1	7.637.520	
				3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kota Serang	6	151.052.750	APBD Kota		6	128.126.900	
				3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen		3	6.161.288.018			3	6.952.882.887	
				3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Bulan	Kota Serang	12	6.065.962.518	APBD Kota		12	6.856.778.637	
				3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	Kota Serang	1	18.040.750	APBD Kota		1	25.171.025	
				3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	Laporan	Kota Serang	2	77.284.750	APBD Kota		2	70.933.225	
				3.30.01.2.03	Admisitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah	%		100	57.332.250			100	60.000.000	

				3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Laporan	Kota Serang	6	57.332.250	APBD Kota		6	60.000.000	
				3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai	%		100	50.444.000			100	55.000.000	
				3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Kota Serang	1	50.444.000	APBD Kota		1	55.000.000	
				3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum	%		100	659.125.128			100	761.592.169	
				3.30.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Serang	1	12.386.390	APBD Kota		1	12.500.000	
				3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Serang	2	159.536.198	APBD Kota		2	160.000.000	
				3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Paket	Kota Serang	1	4.008.576	APBD Kota		1	4.500.000	
				3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Serang	1	25.000.000	APBD Kota		1	30.000.000	
				3.30.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kota Serang	1	86.861.724	APBD Kota		1	90.000.000	
				3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kota Serang	1	31.152.240	APBD Kota		1	35.000.000	
				3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Kota Serang	1	42.000.000	APBD Kota		1	42.000.000	
				3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kota Serang	1	298.180.000	APBD Kota		1	300.000.000	



				3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		100	535.212.341			100	570.000.000		
				3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kota Serang	1	157.200.000	APBD Kota		1	170.000.000		
				3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kota Serang	1	378.012.341	APBD Kota		1	400.000.000		
				3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%		100	780.833.036			100	767.772.874		
				3.30.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kota Serang	24	615.873.036	APBD Kota		24	579.073.374		
				3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang dipelihara	Unit	Kota Serang	35	3.500.000	APBD Kota		35	3.388.000		
				3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kota Serang	83	26.360.000	APBD Kota		83	26.499.000		
				3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Kota Serang	3	135.100.000	APBD Kota		3	158.812.500		
				<b>JUMLAH</b>								<b>13.722.121.395</b>			<b>15.855.349.761</b>	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang merupakan salah satu OPD yang mengelola pendapatan, pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Pelayanan Pasar, untuk target pendapatan Tahun 2023 di 6 (enam) Pasar dan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Pedapatan Perangkat Daerah Tahun 2023**

<b>Kode</b>	<b>Uraian Akun Pendapatan</b>	<b>Target Penganggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
4120602	Retribusi Pelayanan Pasar	<b>1.200,000,000</b>	
	- Pasar Rau	818,000,000	
	- Pasar Serang Plaza	97,000,000	
	- Pasar Kepandean	70,000,000	
	- Pasar Karangantu	73,000,000	
	- Pasar Banten	67,000,000	
	- Pasar Kalodran	75,000,000	
	Retribusi Pelayanan Tera	<b>100,000,000</b>	
	Jumlah	<b>1.300,000,000</b>	

#### **4.2 Rencana Program Mendesak dan Unggulan**

##### **4.2.1 Rencana Program Mendesak**

Masalah Pedagang Kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap Tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan Visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian Kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota, seperti pengusuran dan relokasi.

Rencana Diskoperindag Program Mendesak Tahun 2023 yaitu Pembinaan dan Penataan para PKL yang berada di Pasar sehingga penataan akan lebih baik, dan Pembuatan Perbaikan Awning kios Pedagang di Pasar Lama (Eks Rumah Potong Hewan)

**Tabel 4.2.1**  
**Rumusan Rencana Kegiatan pada Program Mendesak Tahun 2023**

<b>Program Mendesak</b>	<b>Indikasi / Fokus Kegiatan</b>	<b>Pagu Indikatif (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	795.185.000	Penataan PKL
			Rehab Eks Rumah Potong Hewan, Pasar Lama

#### **4.2.2 Rencana Program Unggulan**

Perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi UMKM yaitu: rendahnya kualitas SDM UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang

mendukung dan kelangkaan bahan baku. Perolehan legalitas formal hingga saat ini juga masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Kota Serang, menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan. Untuk itu Diskopukmperindag Kota Serang, merumuskan Program Kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Sub Kegiatan

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan Indikator Fasilitasi Sertifikasi Halal/ Uji masa Simpan/ Pendaftaran Hak Merk dengan Target 35 Pelaku usaha dan Peserta Pelatihan IKM dengan Target 150 Orang.

**Tabel 4.2.2**  
**Rumusan Rencana Kegiatan pada Program Unggulan Tahun 2023**

<b>Program Unggulan</b>	<b>Indikasi / Fokus Kegiatan</b>	<b>Pagu Indikatif (Rp)</b>	<b>Ket</b>
Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pembangunan Kampung/Kelurahan Tematik	252.950.000	Sertifikasi Halal

**Tabel 4.2.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan melalui Sumber Dana APBN atau APBD Provinsi Pada Renja Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2023**

<b>Bidang Urusan /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Kinerja</b>			<b>Pagu Indikatif</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>OPD Pemprov/ Kementerian/ Lembaga</b>
	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>			
Program Pengembangan UMKM						
Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil						
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan Pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	50	200.400.000	APBN	Kementrian Koperasi dan UKM
Program dan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian						
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah keanggotaan Dalam Kabupaten/Kota						

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	50	200.400.000	APBN	
---	--	-------	----	-------------	------	--

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Diskopukmperindag Kota Serang Tahun 2023 adalah dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Kota Serang untuk periode 1 (satu) Tahun, yaitu Tahun 2023, disusun dengan mengacu kepada RKPD Kota Serang Tahun 2023, memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta rencana pendanaannya. Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2023 diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang pada Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang telah menetapkan 12 Program yang akan diimplementasikan dalam 22 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan. Dengan demikian pada Tahun 2023 telah terbangun koridor yang akan menjadi kisi- kisi bagi Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Keluaran dan Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan Visi dan Misi yang dicita- citakan

